

KONDISI TERKINI, TANTANGAN DAN PELUANG PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI LAMPUNG DITINJAU DARI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si

Guru Besar Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Lampung
Wakil Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Lampung

A. PENDAHULUAN

Salah satu indikator kualitas pendidikan sebuah negara dapat dilihat dari index pembangunan manusianya (*Human Development Index*) yang di keluarkan oleh badan dunia yang menangani program-program pembangunan yaitu *United Nation Development Program* (UNDP). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kemajuan suatu daerah dilihat dari pembangunan sumber daya manusianya yang dicerminkan dari ukuran standar sebagai berikut :

1. Indeks atau Angka Harapan Hidup (*Life expectancy*).
2. Indeks Pendidikan yang dihitung dari Angka Melek Huruf (*Adult Literacy Rate*) dan Rata-rata Lama sekolah (*Mean Years of Schooling*).
3. Indeks Daya Beli (*Adjusted Real per Capital*)

Administrator United Nations Development Programme (UNDP), Helen Clark, bersama Perdana Menteri Swedia, Stefan Löfven, dan lead author Selim Jahan meluncurkan laporan pembangunan manusia tahun 2016 awal pekan ini di Stockholm, Swedia. Kemudian

Christophe Bahuét selaku Direktur UNDP Indonesia telah mengumumkan secara resmi Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2016. Dalam laporan tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia bercokol di peringkat 113 dari 188 negara. Beberapa pihak lantas membandingkannya dengan peringkat Indonesia di tahun 2015, di mana terjadi penurunan peringkat dari 110 menjadi 113 (Detik Finance Online, 2017). Untuk membandingkan kemajuan capaian IPM masing-masing negara, UNDP menyarankan kita membaca data tren IPM 1990 hingga 2015. Tren tersebut dapat memperbandingkan nilai IPM antar tahun karena menggunakan data dasar dan metodologi yang sama. Berdasarkan data tren tersebut, IPM Indonesia sebenarnya memiliki tren positif.

Meskipun Indonesia masih termasuk negara dengan kategori menengah untuk pembangunan manusia (*medium human development*), namun harus tetap optimistis. Sebab, nilai IPM Indonesia saat ini sudah mencapai angka 0,689. Agar mencapai kategori *high human development* butuh angka 0,700, yang berarti Indonesia tinggal sedikit lagi untuk mencapainya. Jika Indonesia mampu mempertahankan rata-rata pertumbuhan IPM sebesar 1,07% per tahun maka sebelum tahun 2019, Indonesia sudah mampu berada dalam kategori *high human development*. Tantangan terbesar Indonesia saat ini ialah bagaimana kita mampu mendorong peningkatan rata-rata lamanya sekolah penduduk dewasa di Indonesia sebagai salah satu indikator IPM. Dengan demikian program Indonesia Pintar harus menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan rata-rata lamanya sekolah dan menekan angka *drop out* di sekolah.

B. GAMBARAN UMUM KONDISI PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya pada awal 2017, Biro pusat statistik telah mengeluarkan data IPM seluruh provinsi di Indonesia. Khususnya di Sumatra,

Provinsi Lampung masih menempati juru kunci dengan IPM sebesar 67,65 dan bahkan dibawah rata-rata IPM nasional sebesar 70,18 seperti dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2010-2016 (Metode Baru)

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ACEH	67.09	67.45	67.81	68.30	68.81	69.45	70
SUMATERA UTARA	67.09	67.34	67.74	68.36	68.87	69.51	70
SUMATERA BARAT	67.25	67.81	68.36	68.91	69.36	69.98	70.73
RIAU	68.65	68.90	69.15	69.91	70.33	70.84	71.20
JAMBI	65.39	66.14	66.94	67.76	68.24	68.89	69.62
SUMATERA SELATAN	64.44	65.12	65.79	66.16	66.75	67.46	68.24
BENGKULU	65.35	65.96	66.61	67.50	68.06	68.59	69.33
LAMPUNG	63.71	64.20	64.87	65.73	66.42	66.95	67.65
KEP. BANGKA BELITUNG	66.02	66.59	67.21	67.92	68.27	69.05	69.55
KEP. RIAU	71.13	71.61	72.36	73.02	73.40	73.75	73.99
INDONESIA	66.53	67.09	67.70	68.31	68.90	69.55	70.18

Sumber : Badan Pusat Statistik (2017)

United Nations Development Program (UNDP) telah menetapkan bawa pendidikan menjadi salah satu aspek dalam Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks*). Dalam komposit IPM, aspek pendidikan diukur dengan menggunakan dua indikator yakni; angka melek huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun keatas, dan Rata-rata lama sekolah (RLS). Melek huruf diukur melalui kemampuan membaca dan menulis, sedangkan rata-rata lama sekolah dihitung dengan tiga variabel, yakni partipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedangpernah dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi kasar (APK) mejadi salah satu aspek penting dalam kontribusinya pada peningkatan indeks rata-rata peningkatan lama sekolah. Tabel 2 di bawah ini menunjukkan rata-rata APK DAN Provinsi Lampung tahun 2016. Berdasarkan Tabel 2., di

bawah ini APK provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata nasional, kecuali APK SMP/MTs.

Tabel 2. APM dan APK Pendidikan Lampung Tahun 2015

No	Jenjang Pendidikan	APM	APK (%)
1	PAUD	na	56,34 (65,16)
2	SD/MI	98,32 (93,38)	110,17 (110,68)
3	SMP/MTs	78,20 (81,01)	98,52 (96,91)
4	SMA/MA	58,39 (59,10)	66,06 (74,63)
5	PT	na	15,88 (29,15)

Sumber : Badan Pusat Statistik (2015)

Selanjutnya untuk melihat sebaran IPM menurut kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 3., di bawah ini.

Tabel 3. IPM Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Lampung tahun 2015

No	Provinsi/Ka- bupaten/Kota	AHH (Tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Penge- luaran (Ribu Rupiah)	IPM	Per- tum- buhan (%)
1	Lampung	69.66	12.24	7.48	8476	66.42	1.05
2	Lampung Barat	66.02	11.36	7.25	8459	63.54	0.52
3	Tanggamus	67.12	11.49	6.63	7880	62.67	1.27
4	Lampung Selatan	68.12	10.98	7.01	8441	63.75	0.63
5	Lampung Timur	69.33	12.38	7.16	8814	66.42	0.53
6	Lampung Tengah	68.91	12.16	7.06	9935	67.07	0.75
7	Lampung Utara	68.02	12.38	7.69	7567	64.89	1.38
8	Way Kanan	68.21	11.96	6.76	8278	64.32	0.62
9	Tulang Bawang	68.94	11.11	7.10	9796	65.83	1.42
10	Pesawaran	67.33	11.44	7.21	6680	61.70	1.25
11	Pringsewu	68.01	12.47	7.53	8992	66.58	0.66
12	Mesuji	67.05	10.34	5.80	6764	58.71	0.94
13	Tulang Bawang Barat	68.98	11.29	6.81	7137	62.46	1.62
14	Pesisir Barat	61.74	11.12	7.36	7169	59.76	1.38
15	Kota Bandar Lampung	70.55	13.31	10.85	10702	74.34	0.56
16	Kota Metro	70.98	14.25	10.54	10606	74.98	0.95

Berdasarkan Tabel 3., di atas jelas bahwa hanya terdapat 2 (dua) kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang memiliki IPM di atas rata-rata nasional. Dengan demikian pemerintah daerah provinsi Lampung harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Beberapa upaya yang bisa dilakukan adalah memperbaiki manajemen sekolah, manajemen dan mutu pembelajaran, serta daya akses pendidikan.

C. MENUMBUHKAN IPM MELALUI MANAJEMEN PEMBELAJARAN YANG BERORIENTASI PADA PENUMBUHAN LITERASI DAN KEMAMPUAN ABAD 21

Manajemen berbasis sekolah (MBS) atau *School-Based Management* (SBM) dengan sepenuhnya memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pengambil keputusan tingkat sekolah telah menjadi fitur yang paling menonjol dari sistem manajemen sekolah umum di sebagian besar negara di seluruh dunia, bukan hanya terkait dengan capaian pembelajaran yang bersifat *instructional effect* berupa perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik tetapi juga dampak iringan atau *nurturant effect* seperti peduli lingkungan dan bergotong royong atau bekerja sama sebagai wujud kecerdasan sosial (Bandur, 2012;). Manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah strategi reformasi pendidikan di seluruh dunia yang muncul dalam berbagai pengertian manajemen berbasis kekuatan dan potensi lokal, pengambilan keputusan berbasis potensi lokal kemasyarakatan, pengambilan keputusan berbasis sekolah, dan pengambilan keputusan bersama komunitas sekolah dalam seluruh aspek kehidupan sekolah sebagai sistem sosial dan emosional bagi komunitas sekolah , terutama siswa, yang diselenggarakan secara komprehensif sesuai dengan tuntutan jaman dan kebutuhan masyarakat (Rahman & Fanani, 2013; Rahman, 2014).

Pemerintah Indonesia sejak tahun 1994 melalui Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerapkan pendekatan

baru dalam mengelola sekolah, yang dikenal dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini secara nasional dan berkelanjutan (Depdiknas, 2001 : 1). Melalui MBS, sekolah sebagai sistem pemberdayaan masyarakat diberikan wewenang secara mengelola pendidikan secara komprehensif yang tidak sekedar membawa perubahan pada sistem manajemen sekolah, tetapi hal ini akan berpengaruh pada kebijakan dan orientasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pemecahan masalah masyarakat baik lokal maupun global. Dengan demikian mengembangkan model penyelenggaraan MBS dalam konteks sosial responsibilitas terkait dengan fenomena global abad 21, khususnya membangun literasi dan kemampuan adaptasi warga sekolah, khususnya siswa, dalam mempersiapkan diri menjadi generasi muda yang mampu menjawab tantangan dan menyongsong paradigma baru kompetensi global yang sangat kompetitif.

Para pakar dan pakar manajemen pendidikan mengembangkan paradigma berpikir tentang MBS menjadi lebih atraktif untuk dipelajari, misalnya Anderson (2006) mendefinisikan MBS sebagai "pergeseran kewenangan pengambilan keputusan dari pemerintah distrik ke sekolah masing-masing". Model MBS telah diterima secara luas sebagai inisiatif reformasi besar baik di negara maju termasuk Australia, Selandia Baru, Inggris, Amerika Serikat dan negara berkembang seperti Indonesia, Hong Kong, dan Thailand (Bandur, 2012). Sistem pendidikan Australia sejak pertengahan 1970-an, berinisiatif untuk bergerak menuju konsep baru desentralisasi pendidikan ke tingkat regional dengan memberikan kekuatan dan wewenang yang signifikan ke tingkat sekolah dengan partisipasi masyarakat dalam tata kelola sekolah (Gamage, 2006).

Dalam konteks Inggris, para ilmuwan telah melaporkan bahwa badan pemerintahan sekolah di Inggris dan Wales telah diberi wewenang lebih besar untuk mengelola urusan mereka sendiri dalam kerangka kerja nasional yang jelas (Bush dan Gamage, 2001). Selanjutnya konteks Amerika Serikat, dengan referensi khusus

keberhasilan model SBM Chicago, beberapa pakar menegaskan bahwa otoritas pengambilan keputusan yang dilimpahkan ke Dewan Sekolah Lokal atau *Local School Council* (LSC) sangat penting, terutama mengingat fakta bahwa setiap dewan memiliki wewenang untuk mempekerjakan dan memecat prinsipal berdasarkan pada kontrak kinerja empat tahun (Gamage dan Zajda, 2005; Hanson, 1991). Pakar lain melaporkan bahwa reformasi tersebut telah berkontribusi terhadap peningkatan pengajaran dan pembelajaran, manajemen keuangan dan administrasi, standar perekrutan profesional, dan kinerja akademis dan manajemen sekolah (Edge, 2000; Hess, 1999).

Berdasarkan pakaran yang dilakukan di Victoria dan New South Wales, dan negara-negara lain, Gamage and Sooksomchitra (2004) mendefinisikan MBS sebagai pendekatan pragmatis terhadap perubahan formal model birokrasi administrasi sekolah dengan struktur yang lebih demokratis. Ini mengidentifikasi sekolah individual sebagai unit utama perbaikan yang mengandalkan redistribusi otoritas pembuat keputusan yang melalui upaya ini perbaikan di sekolah dirangsang dan dipertahankan secara signifikan. Dalam konteksnya, fokus pada memfasilitasi perbaikan di sekolah individu sebagai kunci strategi reformasi pendidikan yang sukses memiliki banyak daya tarik publik dan dukungan pakaran lainnya, terutama perbaikan manajemen pembelajaran yang lebih berpihak pada bagaimana menciptakan siswa sebagai aktor pembelajaran dan guru sutradaranya (Cheng & Mok, 2007; Gamage and Zajda, 2005; Gamage, 2006).

Kontribusi pendidikan pada IPM sangat menentukan, baik buruknya kualitas pendidikan dapat dilihat dari beberapa faktor seperti angka partisipasi sekolah, fasilitas, prestasi siswa serta kualitas guru atau tenaga pengajarnya. Jika dilihat dari perspektif kelas, guru memiliki peran sentral keberhasilan proses belajar mengajar di kelas. Sejak ditetapkannya Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam

meningkatkan kualitas guru atau tenaga pengajar seperti melalui program sertifikasi guru, pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop dan lain lain.

Namun demikian, berdasarkan hasil pakaran dari *World Bank* mengenai reformasi guru di Indonesia, disebutkan bahwa program sertifikasi guru belum mampu meningkatkan proses pembelajaran dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kompetensi guru (baik kompetensi substantif maupun kompetensi pedagogik) yang tersertifikasi maupun tidak tersertifikasi (Chang, Iskandar, Al-Samarrai, Ragatz, Shaeffer, de Ree, dan Stevenson, 2013). Hal ini juga diperburuk dengan persiapan yang dilakukan oleh guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Hasil pakaran yang dilakukan oleh *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) yang menunjukkan bahwa hanya 46 % guru yang merasa sangat siap dengan kegiatan rutin pembelajaran di kelas. Angka ini dibawah negara tetangga kita Malaysia dan Thailand yang memiliki presentase lebih tinggi yaitu 68 % dan 53 % secara berturut-turut (Mullis, Martin, Foy dan Arora: 2012).

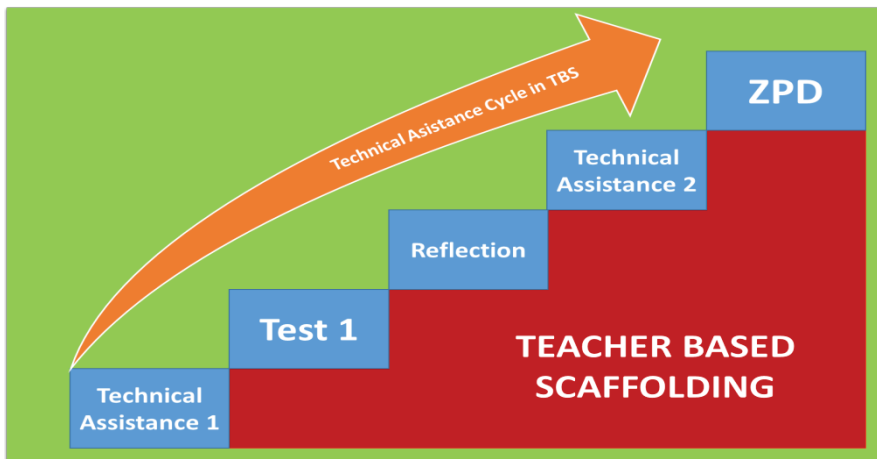
Walaupun berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam memperbaiki sistem pendidikan kita, namun sepertinya masih perlu mencari berbagai alternatif dalam meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Beberapa upaya lain juga telah dilakukan oleh pemerintah kita selama satu dekade terakhir. Sejak di berlakukannya desentralisasi pendidikan, ternyata hal ini pun belum mampu memberikan solusi yang efektif menyelesaikan persoalan pendidikan di negara kita terutama menyangkut kualitas guru. Di satu sisi memang manajemen guru menjadi lebih sederhana dan diberikan sepenuhnya kepada daerah, akan tetapi justru disisi lain kemampuan daerah yang relatif tidak sama antara daerah satu dengan lainnya menyebabkan pola pengembangan guru seolah jalan ditempat dikarenakan kurangnya sumber daya yang ada.

Upaya lain pemerintah antara lain dengan adanya program manajemen berbasis sekolah, peningkatan standar kualitas nasional, pemberian bantuan operasional sekolah ternyata hasilnya juga belum secara maksimal meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas (Chang, Iskandar, Al-Samarrai, Ragatz, Shaeffer, de Ree, dan Stevenson, 2013). Hal ini sebenarnya bukan hanya dialami oleh Indonesia sebagai negara berkembang, tetapi juga dialami oleh negara-negara berkembang lainnya, bahwa anggaran dan program yang diterapkan sebuah negara tidak selamanya berbanding lurus dengan hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya kualitas pendidikan (Glewwe, dan Kremer, 2006). Upaya pemerintah untuk menitikberatkan kepada kebijakan mengenai guru terus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Sebagai salah satu faktor penting dalam memperbaiki pendidikan nasional, guru berada di garda terdepan di kelas yang menjadi aktor utama pembelajaran perlu terus ditingkatkan kualitas profesionalismenya melalui berbagai *teacher development program* yang dimodifikasi dari berbagai inovasi dan teori baru dalam pembelajaran. Salah satu alternatif model pengembangan profesionalisme guru berkelanjutan adalah model *Teacher-Based Scaffolding* (Rahman et al, 2015).

Dengan menggunakan desain ini, peserta (guru) yang menjadi subyek pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) dianalisa kemampuan awalnya berdasarkan hasil dari uji kompetensi. Uji pengetahuan konten guru terhadap bidang studi yang diajarnya dikembangkan dalam bentuk tes pilihan ganda yang diadopsi dari soal soal ujian nasional untuk tingkat SMA. Selanjutnya guru akan dikelompokkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Tahap ini, peserta program ini akan (1) menjadi kelompok belajar, (2) menemukan kebutuhan, (3) memilih dan menggunakan metode dan bahan-bahan, (4) mengevaluasi dampak dan hasil, dan (5) perencanaan dan kegiatan belajar partisipatif bidang-pengujian. Model yang dikembangkan untuk kelompok ini dimodifikasi dari

Kennedy (2005), Engin (2014) dan Smit et al. (2013). Selain kompetensi mereka, diperlukan juga adanya analisis terhadap Kebijakan Pendidikan yang ada, dan apa dampak serta pengaruhnya terhadap pengembangan profesionalisme guru. Sehingga nantinya akan tergambar dengan baik *Existing Conditions* dari guru-guru tersebut. Keadaan ini akan menjadi pertimbangan penting dalam menganalisis kebutuhan dan karakter guru.

Dari hasil *need analysis* tersebut, rancangan program pengembangan profesionalisme guru akan dapat diperoleh dengan baik dan secara komprehensif menjadi *entry point* yang positif dalam merancang programnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang desain programnya, tahap awal dapat dilakukan dengan mengklasifikasi hasil *need analysis* tersebut untuk mengidentifikasi kebutuhan program yang diperlukan guru. Tujuan dan sasaran program tersebut akan dapat tercapai dengan baik, sehingga nantinya rekrutmen peserta program ini juga akan lebih selektif. Namun demikian, diperlukan juga persiapan perangkat, sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya program dengan baik



Gambar 1. Siklus Technical Asistance pada TBS

D. MENCIPTAKAN WARGA SEKOLAH YANG ADAPTIF TERHADAP TANTANGAN ABAD 21 UNTUK MENINGKATKAN IPM

Permasalahan yang terjadi saat ini di Indonesia adalah masih terdapat pembelajaran konvensional yang secara profesional belum dikelola dengan melibatkan siswa agar mereka tertarik dan secara aktif mempelajari dan menginvestigasi aspek-aspek kehidupan yang kontekstual dan lokal dalam proses membangun pengalaman belajarnya yang mengarah pada *scientific reasoning* (Dominguez & Jaime, 2010; Sahin, 2009; Permanasari, 2016). Oleh karena itu, diperlukan sejumlah inovasi guru dalam mengemas pembelajaran dalam konteks, sehingga akan menumbuhkan ketertarikan kembali atau minat siswa pada bidang-bidang kelimuan yang akan berdampak pada penumbuhan kemampuan abad 21 yaitu berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*) seperti berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah atau *problem solving* (Tiwari et al, 2006; Permanasari, 2016). Misalnya digunakannya pendekatan *STEM education* dari berbagai perspektif keilmuan yang berbasis sains lokal dapat menjadi kunci bagi menciptakan generasi penerus bangsa yang memiliki literasi tinggi dan mampu bersaing di Abad 21 dan memberikan peluang bagi guru untuk memperlihatkan kepada peserta didik mengenai fakta, konsep, prinsip, dan teori sains, teknologi, enjiniring, dan matematika yang digunakan secara terintegrasi dalam pengembangan produk, proses, dan sistem *knowledge* dan *skills* yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan STEM sangat penting sebagai bagian dari proses reformasi pendidikan di Indonesia (Abdurrahman, 2016).

Selain itu yang tak kalah penting adalah kepemimpinan di sekolah haus benar-benar merupakan kepemimpinan akademik. Sekolah adalah sebuah organisasi yang kompleks. Kepemimpinan merupakan faktor sentral dalam organisasi sekolah. Kepemimpinan merupakan penggerak utama organisasi dalam melakukan perubahan dan manajemen yang dilakukannya sehingga keberadaan pemimpin

bukan hanya sebagai simbol pimpinan organisasi, tetapi kontribusi harus memberi dampak positif bagi perkembangan organisasi (Ryan, 2008). Kepemimpinan Kepala Sekolah merupakan elemen kunci dalam organisasi sekolah (Huber, 2004). Semua komponen pendidikan, mulai dari kurikulum, sarana-prasarana, biaya, pendidik dan tenaga kependidikan, dan sebagainya tidak akan berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan, apabila esensi peran kepemimpinan Kepala Sekolah tidak berjalan sebagaimana mestinya (Gorton, Alston, dan Snowden, 2007). Dengan kata lain, semua komponen pendidikan, terutama program pelaksanaan kurikulum di kelas akan bergairah apabila dipimpin oleh Kepala Sekolah yang berkualitas, efektif, dan kreatif. Begitu juga pentingnya peran kepala sekolah dalam mentransformasikan komponen-komponen pendidikan, bahkan dapat dinyatakan bahwa di sekolah tidak akan ada perubahan atau peningkatan kualitas yang memadai dan signifikan tanpa kepemimpinan kepala sekolah yang berkualitas dan efektif (Sukarjo, 2013).

Salah satu peran kepemimpinan kepala sekolah adalah menjamin berjalannya organisasi sekolah secara efektif, efisien, dan berkualitas di pusat roda organisasi, yaitu di kelas. Kelas tempat dimana kurikulum diimplementasikan dalam proses pembelajaran merupakan pusat kegiatan (*core business*) pendidikan di sekolah (Ryan, 2008). Kepemimpinan organisasi sekolah yang dijalankan oleh Kepala Sekolah harus langsung menyentuh ranah tersebut. Dengan kata lain kepemimpinan kepala sekolah dalam mengarahkan dan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia sangat menentukan keberhasilan proses belajar di sekolah. Guna mewujudkan tanggung jawab tersebut, maka kepala sekolah sangat berperan dalam mengendalikan keberhasilan kegiatan pendidikan, meningkatkan keterlaksanaan tugas tenaga kependidikan sesuai dengan tujuan pendidikan, dan mengatur secara professional pendayagunaan serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan (Sujito, 2010).

Kajian tentang kepemimpinan sekolah sebenarnya sudah sejak lama diarahkan pada kemampuan bagaimana seorang kepala sekolah memberdayakan semua warga sekolah, baik guru maupun siswa (Spillane, Halverson, & Diamond, 2001). Namun hampir di semua negara, terdapat banyak kendala yang masih mempengaruhi kinerja kapal sekolah dalam melaksanakan perilaku kepemimpinannya, diantaranya sistem birokrasi yang masih *top down*, sistem penjenjangan karir guru yang masih ambigu antara kebutuhan profesional dengan birokrasi yang kental muatan politisnya, sistem pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah yang tidak berorientasi pada kebutuhan dan tantangan pendidikan di masa yang akan datang, tetapi lebih kepada kebutuhan yang bersifat struktural belaka dan tidak berorientasi pada peningkatan pengeloaan pembelajaran sebagai *core business* pendidikan yang berdampak langsung pada pencapaian kompetensi dan prestasi siswa (Huber, 2004).

E. MENINGKATKAN IPM MELALUI PENUMBUHAN BUDAYA MUTU DAN DAYA AKSES PENDIDIKAN UNTUK SEMUA USIA

Beberapa masalah pendidikan secara umum yang dijumpai di provinsi lamoung saat ini adalah; (1) masih banyaknya tingkat kerusakan infrastruktur pendidikan dasar khususnya SD, menyebabkan sulitnya distribusi dan proporsi alokasi anggaran pendidikan yang berorientasi pada pembangunan fisik dan non fisik yang kadang harus mempertimbangkan skala prioritas; (2) penyebaran guru, serta tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan pada setiap kecamatan di seluruh wilayah provinsi Lampung, ada kecamatan dengan jumlah guru yang gemuk, namun di kecamatan lain sangat kekurangan guru terutama di wilayah terluar, terdepan, dan terpencil; (3) Relevansi pendidikan dengan kebutuhan ketenaga kerjaan masih rendah, sehingga lulusan pendidikan belum siap kerja (baru siap latih), dan menimbulkan

masalah pengangguran; (4) Belum semua kecamatan di provinsi Lampung memiliki Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sebagai pusat penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan non formal yang mengakses mereka yang tidak berkesempatan melanjutkan pendidikan formal serta memberikan akses pada mereka orang dewasa yang belum sempat mengenyam pendidikan formal.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan pendidikan agar berkontribusi pada peningkatan IPM provinsi Lampung adalah: (1) meningkatkan perhatian dan dukungan *stakeholder* pendidikan di level provinsi dan seluruh kabupaten/kota di provinsi Lampung, termasuk adanya dukungan politis dari legislatif terhadap upaya menghasilkan regulasi pembangunan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan mutu dan daya akses pendidikan; (2) membangun keadasaran konterusi nyata dari berbagai perusahaan dan industri (DUDI) terhadap pendidikan, melalui pemberian berbagai bantuan fisik dan non fisik ke sekolah, dalam bentuk beasiswa, perbaikan bangunan, sumbangan buku, ide pemikiran, dan lain-lain; (3) meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap partisipasi pendidikan bagi anak usia sekolah melalui wacana adanya fakta integritas masyarakat dan pemerintah daerah dan didukung oleh kesepakatan bersama antara Legislatif dan Gubernur/Walikota/bupati untuk akselerasi Wajar 12 Tahun; (4) membangun keserasan parsipasi, perhatian dan kontribusi masyarakat terhadap biaya pendidikan di sekolah melalui berbagai upaya sesuai dengan kemampuan dan level partisipasi yang memungkinkan semua warga negara mengambil bagian partisipasi secara proporsional; (5) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menganggarkan bantuan biaya pendidikan yang cukup tinggi bagi pembangunan pendidikan di Provinsi Lampung melalui kesepakatan untuk sharing dana antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk perbaikan bangunan, terutama sekolah jenjang pendidikan

dasar yang usia bangunannya sudah cukup tua. masyarakat semakin kritis dan sadar mutu, sehingga muncul lembaga pendidikan swasta yang berkualitas sebagai mitra pemerintah.

Secara singkat kami sampaikan bahwa pemerintah provinsi lampung serta kabupaten/kota perlu segera melakukan akselerasi sejumlah program strategis pencapaian pembangunan pendidikan dalam aspek-aspek seperti pada tabel 4., di bawah ini.

Tabel 4. Program dan arah kebijakan strategis Pemda Provinsi Lampung

Program		Arah kebijakan strategis
Pendidikan Dasar dan PAUD		Semua anak usia dini (0-6 thn) memiliki kesempatan yg sama untuk tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensi dan tahap perkembangan usianya melaui berbagai lembaga pendidikan baik yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta Meningkatkan pemerataan dan perluasan layanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau bahkan jika perlu menggratiskan pendidikan bermutu bagi masyarkat di daerah terluar, terjauh, terpencil, dan perbatasan.
Pendidikan Menengah		Menumbuhkan kuantitas dan kualitas pendidikan menengah umum dan kejuruan, dalam upaya mewujudkan rintisan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun di seluruh wilayah provinsi Lampung melalui pemberdayaan semua <i>stakeholders</i> pendidikan.
Pendidikan Sekolah	Luar	Memberi pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang belum sekolah, tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah, dan masyarakat yang kebutuhan pendidikannya tidak dapat

	terpenuhi melalui jalur pendidikan formal dengan membangun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) baik oleh pemerintah, masyarakat, swasta, DUDI, dan lain-lain, sehingga bisa meningkatkan angka melek huruf dan lama sekolah
Pendidikan Tinggi	Memberikan bantuan pendidikan kepada lulusan SMA dan sederajat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi melalui program kemitraan khusus atau beasiswa pemerintah daerah berikut biaya hidup dan sarana pendidikan lainnya.

F. PENUTUP

Sehebat apapun pegelola dan pimpinan sekolah, manajemen pembelajaran tidak akan membuahkan *out put* dan *outcome* pendidikan yang konstruktif bagi penyiapan anak didik agar memiliki kecukupan literasi dan kemampuan abad 21, jika semua warga sekolah belum bersinergi secara sinergis dalam menciptakan atmosfir akademik dan non akademik yang baik di sekolah, termasuk di dalamnya komite sekolah sehingga terciptanya *school good governance* (Rahman, 2014). Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah sangat menentukan semangat dan kreativitas guru dalam menyelenggarakan pembelajaran, sehingga berdampak pada kualitas belajar dan prestasi siswa (Rahman, 2013). Guru yang mampu menginspirasi peserta didik menjadi pembelajar sejati (*long life learner*) merupakan prasyarat utama bagi berlanngsungnya implementasi manajemen pembelajaran yang inovatif, efektif, dan *joyful learning* (Darling-Hammond, 1999). Selain itu mambangun komitmen keterlibatan (*engagment*) siswa dalam semua aspek pedagogik beserta perangkatnya merupakan potensi luar biasa yang harus terus diciptakan dalam konteks manajemen pembelajaran yang sukses.

Sebaliknya pola manajemen sekolah yang kurang respek terhadap keberadaan guru, komite, siswa, dan masyarakat ketika mengimplementasikan program-program sekolah justru akan sangat tidak populer di kalangan warga sekolah, bahkan cenderung akan menimbulkan konflik manajemen yang menyebabkan sekolah menjadi kontra-produktif (Gorton, Alston, dan Snowden, 2007). Pada akhirnya kontribusi semua masyarakat dan *stakeholder* pendidikan pada capaian indikator IPM bidang pendidikan sangat menentukan keberhasilan Provinsi Lampung berkontribusi nyata dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

REFERENSI

- Abdurrahman. (2016). STEM Education: peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Pembelajaran Sains Inovatif. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan IPA, ISBN: 978-979-3262-13-0. Jurusan PMIPA FKIP Universitas Lampung, 4 Maret 2017.*
- Anderson, W., (2006). Site-based management. In: Smith, S.C., Piele, P.K. (Eds.), *School Leadership: Handbook for Excellence in Student Learning*. SAGE Publications, London, pp. 223–244.
- Bandur, A. (2012). School-based management developments and partnership: Evidence from Indonesia. *International Journal of Educational Development*, 32(2), 316–328.
- Bush, T., & Gamage, D.T., (2001). Models of self-governance in schools: Australia and the United Kingdom. *The International Journal of Educational Management*, 15 (1), 39–44.
- Chang, M. C., Iskandar, S., Al-Samarrai, S., Ragatz, A. B., Shaeffer, S., de Ree, J., & Stevenson, R. (2013). *Teacher reform in Indonesia: the role of politics and evidence in policy making*. World Bank Publications Darling-Hammond, L. (1999). *Teacher quality and student achievement: A review of state policy*

- evidence*. Seattle, WA: Center for the Study of Teaching and Policy, University of Washington.
- Cheng, Y.C., & Mok, M.M.C. (2007). School-based management and paradigm shift in education: an empirical study. *International Journal of Educational Management*, 21 (6), 517–542.
- Depdiknas. (2001). *Konsep dan Pelaksanaan dalam Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Dikmenum.
- Detik finance online. 2017. *Peringkat Indeks Pembangunan Manusia RI Turun, Ini Kata Pemerintah*. Diakses melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3455970/peringkat-indeks-pembangunan-manusia-ri-turun-ini-kata-pemerintah>. Diunduh tanggal 21 september 2017.
- Dominguez, C. & Jaime A. (2010). Database design learning: A project based-approch organized through a course management system. *Computers & Education*, 55(3), 1312–1320.
- Edge, K., (2000). *Decentralization and School-Based Management (SBM)*. diakses 2 Oktober 2017, dari <http://www.worldbank.org.edu>.
- Engin, M. (2014). "Macro-Scaffolding: Contextual Support for Teacher Learning." *Australian Journal of Teacher Education* 39(5): 2.
- Gamage, D.T., (2006). School-based management: shared responsibility and quality in education. *Education and Society*, 24 (1), 27–43.

- Gamage, D.T., & Sooksomchitra, P., (2004). Decentralization and school-based management. *International Review of Education*, 50 (1), 289–305.
- Gamage, D.T., Zajda, J., (2005). Decentralization and school-based management: a comparative study of self-governing schools models. *Educational Practice and Theory*, 27 (2), 35–58
- Glewwe, P., & Kremer, M. (2006). Schools, teachers, and education outcomes in developing countries. *Handbook of the Economics of Education*, 2, 945-1017. Gorton R., Alston J.A., dan Snowden P. 2007. *School Leadership & Administration: Important Concepts, Case Studies, & Simulations* (7th Ed). New York: Mc Graw Hill.
- Hanson, E.M., (1991). *School-Based Management and Educational Reform: Cases in the USA and Spain*. Diakses 20 Januari 2017, dari <http://www.eric.ed.gov/>.
- Hess, G.A., (1999). Understanding achievement (and other) changes under Chicago school reform. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 21 (1), 67–83.
- Huber, S. G. (2004). School leadership and leadership development: adjusting leadership theories and development programs to values and the core purpose of school. *Journal of Educational Administration*, 42(6), 669-684.
- Kennedy, A. (2005). "Models of continuing professional development: a framework for analysis." *Journal of in-service education* 31(2): 235-250
- Malik, K. (2013). Human Development Report 2013. The rise of the South: Human progress in a diverse world. New York: UNDP.

- Mullis, I. V., Martin, M. O., Foy, P., & Arora, A. (2012). *TIMSS 2011 International Results in Mathematics*. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Herengracht 487, Amsterdam, 1017 BT, The Netherlands.
- Permanasari, Anna. (2016). *STEM Education: Inovasi dalam Pembelajaran Sains*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Sains. hal 23-34, Universitas Sebelas Maret, 22 Oktober 2016.
- Rahman, B. dan Fanani R. (2013). Academic Quality Management as a Means for Improving Institutional Productivity: Strategic Factors in Teacher Training in Lampung, Indonesia. *Asian Journal of Education*. Vol.14, No.1.
- Rahman, B. (2013). Perilaku Kepemimpinan dan Prestasi Siswa: Analisis Persepsi Guru Lintas Jenjang. *Jurnal Pendidikan Progresif*. Vol.3, No.1.
- Ryan, Will. 2008. *Leadership with a Moral Purpose: Turning your School Inside Out*. Wales: Crown House Publishing Ltd
- Spillane, J. P., Halverson, R., & Diamond, J. B. (2001). Investigating school leadership practice: A distributed perspective. *Educational researcher*, 23-28.
- Sahin, M. (2009). Correlations of student grades, expectation, epistemological belief and demographics in a problem-based physics course. *International Journal of Environmental and Science Education*. 4(2), 169-184.
- Sahin, A. (2013). STEM Project-Based Learning. In *STEM Project-Based Learning* (pp. 59-64). Sense Publishers.
- Smit, J., van Eerde, H.A.A., & Bakker, A. (2013). A conceptualization of whole-class scaffolding. *British Educational Research Journal*, 39(5), 817-834.

- Sujito, Agus. 2010. Kepemimpinan Pada Sekolah Berstandar Nasional (Studi Kasus pada Kepemimpinan Kepala Sekolah SMP N-1, Gubug). *Jurnal Varia Pendidikan*. 22 (1).
- Sukarjo. 2013. Kepemimpinan Kepala Sekolah di SD negeri 1 Langneharjo Kota Kendal. *Jurnal Educational Management*, 2 (1).
- Tiwari, A., Lai, P., So, M., & Yuen, K. (2006). A comparison of the effects of problem-based learning and lecturing on the development of students' critical thinking. *Medical education*, 40(6), 547-554.